



BPKP DIY Puji Kinerja Pemkot Jogja

UMBULHARJO -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DIY memuji kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di bidang keuangan. Pemkot menerima banyak penghargaan nasional menyangkut kinerja pemerintahan, serta menjadi salah satu dari hanya 15 kabupaten dan kota di Indonesia yang penilaian keuangan daerahnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pujian itu dilontarkan Kepala BPKP DIY Bambang Setiawan, usai penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot dengan BPKP DIY, untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah.

Naskah kesepakatan bersama ditandatangani Walikota Yogyakarta H Herry Zudianto dan Bambang Setiawan di Kantor

Walikota Yogyakarta Kompleks Balaiikota Timoho, Rabu (28/4).

Bambang mengutarakan, penerbitan Inpres No 4 tahun 2011 dilatarbelakangi keprihatinan dengan kondisi akuntabilitas keuangan negara di pemerintahan.

Antikorupsi
Selama ini, akuntabilitas keuangan negara belum optimal. Indikatornya, lebih dari 150 kepala daerah dari 524 kepala daerah di Indonesia berurusan dengan hukum.

"Ini menandakan akuntabilitas operasional jalannya pemerintahan belum optimal. Aparatur pemerintah yang diberi amanah mengelola keuangan negara atau daerah ternyata belum bisa berakuntabilitas secara optimal. Indikatornya adalah dari 524 pemerintah daerah di Indonesia, baru 15 Pemda diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Salah satunya adalah Pemkot

Yogyakarta," papar Bambang.

Bambang juga memberikah apresiasi Pemkot yang menerima berbagai penghargaan berkaitan dengan kinerja pemerintahan. Satu di antaranya meraih ranking pertama dari KPK atas inisiatif antikorupsi.

"Indikator ini menandakan bahwa Pemkot Yogyakarta dengan kepemimpinan Walikota Bapak Herry Zudianto sudah cukup amanah, sehingga KPK, sebuah lembaga anti korupsi, memberikan penghargaan. Ini adalah sebuah tantangan yang perlu dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi," tambah Bambang.

Pendampingan
Bambang menyatakan selalu siap membantu Pemkot melalui lembaga inspektorat dalam memberikan pendampingan berkaitan dengan upaya percepatan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemkot. Pada kesempatan itu Herry mengemuka-

kan, kesepakatan bersama itu merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih, yang selalu dikaitkan dengan tujuan reformasi dan proklamasi.

Yakni menjadikan Indonesia bangsa yang maju, sejahtera, berdaulat, dan bermartabat. Untuk membangun hal itu, usaha promotif dan preventif perlu diupayakan sehingga kesalahan-kesalahan sekecil apapun bisa dihindari.

"Ending dari semua ini adalah kita menjadi pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Jadi pemerintahan yang baik dan bersih itu bukan tujuan akhir. Tetapi tujuan akhir adalah pemerintahan bisa dipercaya oleh rakyatnya. Dan apa yang sudah dibangun dan dicapai Kota Yogyakarta selama ini menunjukkan bahwa kita sudah *on the track*," ucap Herry.

.....
 rkan Kepada Y
 Walikota Yogy
 Wakil Walikota
 Sekretaris Da
 Asisten
 isan Kepada Y

Bes. Dalbana

Negatif Amat Segera Untuk ditanggapi

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Pengendalian Pembanguna | Positif | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo | | | |
| 3. Inspektorat | | | |

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005